

Model Kepemimpinan Strategis dalam Menjaga Stabilitas Sosial dan Nasionalisme Masyarakat Terpencil Terhadap Provokasi Pihak Eksternal

Benny Gusman Sinaga¹, Priyanto², Sigit Purwanto³

^{1,2,3}Universitas Pertahanan Republik Indonesia

E-mail: benny.gusman@gmail.com¹, priyantosuharto@gmail.com², sigit.purwanto@idu.ac.id³

Article History:

Received: 07 Agustus 2026

Revised: 17 Agustus 2026

Accepted: 19 Agustus 2026

Keywords: *kepemimpinan strategis; integrasi nasional; harmoni sosial; kearifan lokal; responsivitas kepemimpinan; wilayah periferi*

Abstract: *Keutuhan negara secara fundamental bertumpu pada ketahanan nasionalisme dan stabilitas sosial. Namun, kedua pilar tersebut kerap menghadapi tantangan di wilayah periferi yang ditandai oleh keterbatasan akses informasi dan tingginya pluralitas sosiokultural. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas model kepemimpinan strategis dalam memelihara harmoni sosial dan integrasi nasional, sekaligus memetakan pola responsivitas pemimpin lokal terhadap penetrasi informasi dan narasi disintegratif dari aktor eksternal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan telaah dokumen yang relevan. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan yang bertumpu pada pemanfaatan kearifan lokal, hubungan patron-klien yang erat, serta kepercayaan timbal balik efektif dalam merespons provokasi eksternal dan menjaga stabilitas sosial. Meskipun demikian, efektivitas tersebut masih menghadapi kelemahan berupa ketergantungan yang tinggi terhadap figur pemimpin tertentu dan keterbatasan sarana pendukung. Responsivitas kepemimpinan teridentifikasi ke dalam tiga pola, yaitu respons cepat dan tepat, respons sedang, serta respons lambat, yang dipengaruhi oleh karakter masalah, tingkat dampak yang ditimbulkan, dan akses terhadap sumber informasi. Kebaruan penelitian terletak pada pemetaan pola dan kecepatan respons kepemimpinan sebagai instrumen untuk mengidentifikasi kekuatan dan kerentanan dalam struktur sosial masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa pemeliharaan integrasi nasional tidak hanya ditentukan oleh instrumen formal, tetapi juga oleh kapasitas, ketepatan respons, dan kebijaksanaan pemimpin lokal dalam menghadapi dinamika arus informasi.*

PENDAHULUAN

Integrasi domestik dan ketahanan nasional merupakan prasyarat mutlak bagi eksistensi sebuah negara di era globalisasi yang sarat akan hubungan antarnegara. Karakteristik geografis Indonesia yang berupa kepulauan dengan keberagaman budaya yang sangat banyak menempatkan persatuan bangsa sebagai hal yang sangat penting, namun di saat yang sama juga sangat rentan terhadap pergeseran dan perbenturan kepentingan maupun nilai sosial (Suwartiningsih et al., 2018). Kerentanan ini terasa jauh lebih nyata dan meningkat tajam pada kelompok masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau daerah pinggiran. Di wilayah-wilayah tersebut, ketimpangan dalam hal akses informasi sangat jelas terlihat, dan campur tangan pihak luar sering kali dilakukan melalui cara-cara yang tampak nyata maupun yang tersembunyi secara halus (Sujarwoto & Tampubolon, 2016; Kartiasih et al., 2023).

Fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa perubahan susunan kekuatan politik dunia dan hubungan antarnegara telah melahirkan cara-cara baru dalam persaingan kekuasaan. Salah satu bentuk persaingan tersebut dikenal dengan istilah perang hibrida, yang dilakukan dengan cara menyebarkan informasi yang tidak benar serta narasi-narasi yang bertujuan untuk memecah belah persatuan bangsa secara terstruktur dan terencana (Freedman et al., 2021; Arcos et al., 2022). Apabila perkembangan situasi ini tidak segera diantisipasi dan ditangani dengan langkah-langkah yang tepat serta matang, dampak yang ditimbulkan dapat berupa perpecahan kelompok masyarakat, berkurangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, serta terjadinya ketidakstabilan kehidupan bermasyarakat (Bennett & Livingston, 2018; Kalniete & Pildegovičs, 2021). Secara keseluruhan, kondisi-kondisi negatif tersebut perlahan namun pasti akan menggerogoti kedaulatan dan keutuhan negara kesatuan kita (Randiawan dkk., 2025).

Peran pemimpin dalam kondisi seperti ini menjadi sangat sentral dan menentukan, ibarat benteng pertahanan utama yang berfungsi menangkis segala ancaman yang datang dari luar. Terutama jenis kepemimpinan yang memiliki pandangan jauh ke depan, mampu menganalisis situasi dengan tajam, dan selalu mendahulukan kepentingan serta kesejahteraan rakyat banyak (Horlings et al., 2018). Pemimpin yang bertugas dan berkedudukan di daerah-daerah terpencil memegang dua tanggung jawab besar sekaligus. Di satu sisi mereka harus menjalankan pemerintahan di daerahnya, namun di sisi lain mereka juga bertugas sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan masyarakat setempat, serta bertindak sebagai pengikat utama agar rasa persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga kuat (Saad & Sulehan, 2014; Ruslanjari et al., 2024).

Dalam upaya menahan dan membendung pengaruh pihak luar yang berusaha melemahkan rasa cinta tanah air masyarakat, kepercayaan dan pengakuan masyarakat terhadap kepemimpinan lokal menjadi faktor yang sangat menentukan hasil akhir (Ricketts & Ladewig, 2008; Ruslanjari et al., 2024). Mengingat kedekatan hubungan sosial yang sangat erat dan kental antara pemimpin dengan rakyat di daerah-daerah tersebut, segala pesan, ajakan, maupun perintah yang disampaikan oleh pemimpin akan memiliki daya ikat dan tingkat kepatuhan yang tinggi di kalangan masyarakat. Kemampuan para pemimpin untuk memahami inti masalah yang sedang berkembang, menjelaskan kebenaran dari informasi yang telah diputarbalikkan, serta membangkitkan kembali semangat dan nilai-nilai kebangsaan menjadi kunci utama agar masyarakat tidak mudah terpengaruh dan terbawa arus oleh pengaruh buruk dari luar yang bertujuan merusak tatanan kehidupan kita (Kusmiati, 2025; Freedman et al., 2021).

Sayangnya, sampai saat ini tulisan-tulisan ilmiah dan penelitian mengenai kepemimpinan masih banyak yang berfokus pada kondisi dan situasi di wilayah perkotaan yang memiliki akses kemudahan dalam segala hal. Sebaliknya, kajian mendalam mengenai bagaimana pola dan cara

kerja kepemimpinan di daerah pedalaman masih sangat jarang dilakukan (Skerratt, 2011; Horlings et al., 2018). Padahal, ciri khas kehidupan sosial budaya serta jenis ancaman yang dihadapi di daerah terpencil memiliki sifat dan karakteristik khusus yang tidak mungkin diselesaikan atau dihadapi menggunakan cara-cara umum yang biasa diterapkan di kota besar (Skerratt, 2011). Selain itu, belum banyak penelitian yang menelaah seberapa cepat dan tepat tanggapan para pemimpin daerah ketika menghadapi masalah-masalah yang berkembang pesat akibat pengaruh dunia luar, serta bagaimana cara mereka menyesuaikan diri agar stabilitas negara tetap terjaga. Padahal, kecepatan dan ketepatan dalam menanggapi perubahan situasi politik dan sosial sangatlah penting untuk dilakukan guna membuang jauh-jauh dampak buruk informasi asing sebelum hal tersebut menyebar luas dan meresap ke dalam kehidupan masyarakat luas (Setiawan, 2023; Arcos et al., 2022).

Berdasarkan keterbatasan dan kekosongan pengetahuan tersebut di atas, maka penelitian ini disusun dan dilaksanakan dengan tujuan utama untuk menelaah serta mengukur seberapa besar keberhasilan pemimpin daerah di wilayah terpencil dalam mencegah dan menanggulangi segala bentuk provokasi yang datang dari luar demi menjaga ketenteraman hidup bersama. Secara bersamaan, penelitian ini juga bertujuan untuk mengelompokkan bagaimana cara dan gaya pemimpin dalam menanggapi isu-isu yang berkembang saat ini, sehingga kita dapat mengetahui hal-hal apa saja yang sudah menjadi kekuatan dan kelemahan dalam diri pemimpin maupun struktur masyarakat setempat. Hasil pemetaan ini nantinya akan menjadi dasar yang kuat untuk menyusun cara perlindungan kedaulatan negara yang lebih pas sasaran dan efektif. Melalui hasil penelitian ini, diharapkan akan terbentuklah pemahaman teoretis dan pedoman praktis mengenai pola kepemimpinan yang luwes dan mampu menyesuaikan diri, yang nantinya bisa dijadikan acuan bagi para pembuat kebijakan dalam rangka memperkuat pertahanan dan persatuan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Widodo, 2024; Adriyanto & Warka, 2023; Horlings et al., 2018; Ruslanjari et al., 2024).

LANDASAN TEORI

Konsep Dasar Kepemimpinan Strategis

Kepemimpinan strategis didefinisikan sebagai kemampuan seorang pemimpin untuk melihat gambaran besar dan jauh ke depan, merencanakan langkah-langkah jangka panjang, serta mengarahkan seluruh potensi sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan bersama sekaligus menjamin keberlangsungan hidup organisasi atau masyarakat di tengah perubahan lingkungan yang cepat dan penuh ketidakpastian (Ireland & Hitt, 1999; Boal & Hooijberg, 2000; Hitt et al., 2010). Menurut pendapat ahli, kepemimpinan jenis ini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengatur dan memerintah, tetapi lebih menekankan pada kemampuan pemimpin untuk memengaruhi, menggerakkan, dan menyatukan pikiran serta tenaga orang-orang yang dipimpinnya agar mau bergerak ke arah tujuan yang telah ditetapkan (Ireland & Hitt, 1999; Hitt et al., 2010). Dalam konteks masyarakat terpencil, kepemimpinan strategis memiliki makna yang lebih luas dan mendalam, yaitu kemampuan menggabungkan antara aturan pemerintahan resmi dengan nilai-nilai budaya dan kebiasaan adat yang sudah hidup turun-temurun di tengah masyarakat (Horlings et al., 2018). Hal ini sejalan dengan pendapat Utomo (2022), yang menyatakan bahwa keberhasilan kepemimpinan di wilayah majemuk sangat bergantung pada kemampuan pemimpin menjembatani kepentingan negara dengan kepentingan lokal agar tercipta kesatuan gerak dan pandangan.

Ada beberapa unsur pokok dalam kepemimpinan strategis, yaitu: pertama, adanya pandangan ke depan yang jelas mengenai arah tujuan; kedua, kemampuan mengenali peluang sekaligus ancaman yang datang dari lingkungan luar; ketiga, kemampuan merancang langkah-

langkah penanggulangan yang tepat sasaran; dan keempat, kemampuan membangun kepercayaan serta kerja sama dengan seluruh pihak yang berkepentingan (Ireland & Hitt, 1999; Hitt et al., 2010). Teori ini sangat relevan diterapkan dalam penelitian ini karena pemimpin di daerah perbatasan dan terpencil dihadapkan pada tantangan yang sangat kompleks, di mana mereka dituntut untuk tidak hanya mengelola urusan dalam negeri saja, tetapi juga sekaligus berfungsi sebagai benteng pertahanan pertama negara terhadap segala pengaruh buruk dari luar (Horlings et al., 2018).

Teori Stabilitas Sosial dan Integrasi Nasional

Stabilitas sosial merujuk pada keadaan di mana kehidupan masyarakat berjalan dengan tertib, damai, teratur, serta adanya keserasian hubungan antara individu maupun kelompok di dalamnya. Kondisi stabilitas ini bukan berarti keadaan yang diam tanpa perubahan sama sekali, melainkan keadaan dinamis di mana segala perubahan dan pertentangan kepentingan masih dapat diselesaikan dan dikendalikan melalui cara-cara yang disepakati bersama tanpa menimbulkan kerusakan atau perpecahan (Chan et al., 2006). Menurut Soekanto (2021), stabilitas sosial sangat bergantung pada kekuatan ikatan sosial, kesamaan nilai, serta adanya lembaga-lembaga sosial yang berfungsi baik dan dipercaya oleh masyarakat. Sementara itu, integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam satu kesatuan wilayah serta pembentukan satu identitas nasional yang diakui dan dihayati oleh seluruh rakyat (Mulyoto, 2011; Naldi et al., 2020).

Dalam perspektif negara kepulauan seperti Indonesia, teori integrasi nasional menekankan pentingnya rasa memiliki dan kesetiaan terhadap negara di atas kesetiaan terhadap kelompok atau daerah masing-masing (Mulyoto, 2011). Hal ini menjadi sangat krusial di wilayah terpencil, mengingat jarak fisik yang jauh dari pusat pemerintahan sering kali menjadi alasan utama melemahnya rasa keterikatan tersebut. Berdasarkan pendapat Myrdal dalam teori penyatuan wilayah, daerah-daerah pinggiran memiliki potensi besar untuk mengalami ketimpangan pembangunan (Myrdal, 1957). Ketimpangan tersebut dapat berlangsung secara kumulatif ketika keuntungan pembangunan semakin terkonsentrasi di wilayah yang lebih maju, sedangkan wilayah perifer mengalami efek balik (*backwash effects*) yang memperlebar kesenjangan. Kondisi ketimpangan wilayah dan akses tersebut juga masih dapat ditemukan dalam konteks Indonesia, termasuk dalam perkembangan akses digital antara wilayah inti, pedesaan, kepulauan, dan daerah terpencil (Sujarwoto & Tampubolon, 2016; Kartiasih et al., 2023). Hal inilah yang sering kali menjadi celah atau titik lemah yang dimanfaatkan oleh pihak luar untuk merongrong persatuan bangsa. Oleh karena itu, stabilitas sosial dan integrasi nasional harus dijaga dan diperkuat terus-menerus, terutama melalui peran pemimpin yang berfungsi menjembatani perbedaan serta memastikan rasa keadilan dan pemerataan terasa sampai ke pelosok negeri (Horlings et al., 2018).

Teori Penetrasi dan Provokasi Eksternal

Dalam hubungan internasional dan politik keamanan, penetrasi eksternal didefinisikan sebagai segala bentuk upaya yang dilakukan oleh negara atau pihak lain dari luar wilayah kedaulatan untuk memengaruhi kondisi politik, sosial, ekonomi, maupun budaya suatu negara lain demi kepentingan mereka sendiri. Provokasi merupakan salah satu bentuk tindakan penetrasi yang bertujuan khusus untuk menimbulkan reaksi, kemarahan, atau pertentangan di dalam masyarakat sasaran, sehingga kekuatan negara tersebut melemah dan mudah dikendalikan. Teori ini dikembangkan dari konsep perang urat sarana dan perang non-militer, di mana kekuatan militer tidak lagi menjadi alat utama, melainkan digantikan oleh kekuatan informasi, budaya, ekonomi, dan politik (Freedman et al., 2021; Arcos et al., 2022). Sebagaimana dijelaskan oleh Nye (2023)

dalam konsep kekuatan lunak (*soft power*), pengaruh asing dapat masuk dan menguasai pemikiran masyarakat jika nilai dan budaya yang ditawarkan dianggap lebih menarik atau menguntungkan dibandingkan nilai asli yang dimiliki masyarakat tersebut.

Bagi masyarakat di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan dalam mengakses dan memilah informasi, teori ini menjelaskan mengapa kelompok masyarakat tersebut menjadi sasaran utama. Kurangnya pengetahuan tentang situasi politik global dan keterbatasan sarana komunikasi membuat narasi-narasi yang dibawa pihak luar sering kali tampak benar, menarik, atau menguntungkan, padahal tersembunyi maksud untuk merusak persatuan. Kesenjangan akses informasi antara wilayah perkotaan dan perdesaan maupun antara wilayah utama dan daerah terpencil di Indonesia telah ditunjukkan dalam sejumlah penelitian mengenai kesenjangan digital (Sujarwoto & Tampubolon, 2016; Kartiasih et al., 2023). Di sisi lain, literatur mengenai ancaman hibrida menunjukkan bahwa manipulasi informasi dan disinformasi dapat mengeksploitasi kerentanan sosial serta memengaruhi kohesi dan stabilitas masyarakat (Freedman et al., 2021; Arcos et al., 2022). Oleh karena itu, peran kepemimpinan menjadi sangat vital sebagai penyaring dan penafsir utama informasi agar masyarakat tidak terjebak dalam pemahaman yang salah.

Kearifan Lokal sebagai Basis Ketahanan Sosial

Kearifan lokal adalah segala bentuk pengetahuan, pandangan hidup, serta strategi yang dikembangkan oleh masyarakat setempat melalui pengalaman panjang untuk mengatur kehidupan mereka sendiri dan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya (Berkes & Ross, 2013; Ruiz-Mallén & Corbera, 2013). Nilai-nilai ini tercermin dalam adat istiadat, hukum tradisional, cara berkomunikasi, hingga sistem kepemimpinan adat yang berlaku. Menurut teori ketahanan budaya, masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai asli budayanya akan memiliki kekebalan yang lebih kuat terhadap masuknya pengaruh asing yang bertujuan merusak atau mengubah jati diri bangsa. Hal ini karena kearifan lokal berfungsi sebagai pagar pelindung dan penentu arah dalam menyaring unsur-unsur luar mana yang boleh diterima dan mana yang harus ditolak demi kebaikan bersama. Dalam perspektif resiliensi komunitas, kemampuan masyarakat untuk mengembangkan dan menggunakan sumber daya, pengetahuan, jaringan, serta kapasitas kolektif yang dimilikinya merupakan unsur penting untuk bertahan dan beradaptasi menghadapi perubahan dan ketidakpastian (Magis, 2010; Berkes & Ross, 2013).

Dalam konteks penelitian ini, teori kearifan lokal menjadi landasan utama untuk memahami mengapa pola kepemimpinan yang berbasis adat dan budaya jauh lebih efektif di daerah terpencil dibandingkan pola kepemimpinan birokrasi biasa. Kepemimpinan yang berakar pada karakteristik lokal dapat memperkuat pembelajaran bersama, kerja sama, pembentukan jaringan, dan kapasitas kolektif masyarakat dalam menghadapi persoalan yang berkembang di wilayahnya (Horlings et al., 2018). Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, serta rasa persaudaraan yang erat terbukti menjadi perekat sosial yang sangat kokoh sekaligus senjata ampuh untuk melawan segala bentuk provokasi yang berusaha memecah belah persatuan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, praktik kearifan lokal juga ditemukan berfungsi sebagai medium kohesi sosial yang memungkinkan kelompok dengan identitas berbeda mempertahankan hubungan sosial dan kehidupan bersama secara damai (Jayadi, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena peneliti bermaksud untuk memahami secara mendalam dan rinci mengenai makna, proses, serta dinamika sosial yang terjadi di lapangan, yang tidak mungkin cukup jika

hanya diukur dengan angka atau hitungan statistik semata (Moleong, 2022; Patton, 2015). Sementara itu, jenis penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, menuturkan, dan melukiskan keadaan yang sebenarnya terjadi di lokasi penelitian mengenai bagaimana peran dan efektivitas kepemimpinan dalam menjaga stabilitas serta bagaimana cara pemimpin menanggapi pengaruh luar, tanpa mengubah atau melakukan percobaan terhadap variabel-variabel yang ada (Sugiyono, 2024).

Pendekatan ini dianggap paling tepat dan sesuai dengan tujuan penelitian karena kemampuannya untuk mengungkapkan hal-hal yang bersifat tidak terukur secara fisik namun sangat nyata pengaruhnya, seperti nilai-nilai kepercayaan, rasa cinta tanah air, pandangan hidup, serta cara-cara bertindak kolektif yang terikat erat dengan tradisi dan adat istiadat setempat (Moleong, 2022; Patton, 2015). Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memaparkan secara lengkap dan utuh bagaimana fenomena kepemimpinan strategis itu berjalan, bekerja, dan memberikan dampak di tengah kehidupan masyarakat daerah terpencil.

Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja pada wilayah terpencil yang memiliki ciri khas kondisi sosial yang beragam serta memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap masuknya pengaruh dan isu dari luar daerah. Karakteristik terpisahnya lokasi tersebut dari pusat pemerintahan utama menjadikannya sebagai tempat yang sangat tepat untuk meneliti masalah ketahanan nasional, mengingat keterbatasan akses informasi dan komunikasi di sana melahirkan cara dan gaya kepemimpinan yang sangat khusus dan berbeda dengan daerah lain.

Subjek atau narasumber dalam penelitian ini ditentukan dengan cara pemilihan berdasarkan kriteria tertentu atau yang dikenal dengan istilah *purposive sampling*. Cara ini dipilih agar peneliti dapat menemukan orang-orang yang benar-benar paham, terlibat langsung, dan memiliki informasi lengkap mengenai masalah yang diteliti, sehingga kedalaman dan kebenaran data dapat terjamin (Pawito, 2007; Patton, 2015; Palinkas et al., 2015). Mereka yang menjadi narasumber utama meliputi para pejabat pemerintah daerah, pemuka adat yang dihormati, tokoh agama, serta wakil-wakil dari berbagai lapisan masyarakat yang dianggap mampu mewakili pendapat umum warga setempat.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk menjamin kebenaran data serta mendapatkan pandangan yang lengkap dan menyeluruh, proses pengumpulan informasi dan fakta di lapangan menerapkan tiga teknik utama, yaitu:

1. Wawancara Mendalam: Teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab yang mendalam, panjang, dan terbuka, namun tetap berpedoman pada pokok-pokok permasalahan yang telah disiapkan sebelumnya. Melalui cara ini, peneliti berusaha menggali sedalam-dalamnya pandangan pribadi, pengalaman nyata, kebijakan yang pernah diambil, serta cara-cara yang selama ini digunakan oleh para pemimpin untuk menetralkan atau menanggulangi berita buruk maupun pengaruh negatif dari luar. Pedoman wawancara disusun secara luwes dan tidak kaku, sehingga memberi kesempatan luas kepada narasumber untuk bercerita dan menjelaskan keadaan secara rinci dan lengkap (Satori & Komariah, 2020; Patton, 2015).
2. Observasi Partisipatif: Peneliti turun langsung ke lokasi dan ikut serta mengamati secara nyata bagaimana interaksi antarwarga berlangsung, bagaimana cara pemimpin mengambil keputusan penting, serta bagaimana sikap dan tanggapan masyarakat ketika mendengar atau

mendapatkan kabar-kabar baru yang datang dari luar daerah. Pengamatan ini dilakukan untuk mendapatkan bukti nyata yang dilihat dengan mata kepala sendiri, sehingga tidak hanya bergantung pada ucapan atau penjelasan narasumber saja (Moleong, 2022; Satori & Komariah, 2020).

3. Studi Dokumentasi: Peneliti mengumpulkan, membaca, dan menelaah secara kritis segala jenis tulisan resmi, dokumen kebijakan, catatan sejarah, berita daerah, maupun tulisan-tulisan lain yang ada kaitannya dengan topik penelitian. Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai pembanding dan alat penguat kebenaran terhadap data yang didapatkan dari hasil wawancara maupun pengamatan langsung (Arikunto, 2014; Satori & Komariah, 2020). Penggunaan berbagai teknik dan sumber data tersebut sekaligus dapat memperkuat kredibilitas temuan melalui proses triangulasi (Korstjens & Moser, 2018).

Teknik Analisis Data

Seluruh data yang sudah berhasil dikumpulkan di lapangan kemudian diolah dan dianalisis menggunakan cara kerja yang saling berhubungan dan berlangsung terus-menerus hingga penelitian selesai, sesuai dengan model analisis data penelitian kualitatif. Langkah-langkah pokoknya terdiri dari tiga tahapan besar, yaitu tahap pengurangan data, tahap penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan serta verifikasi (Miles & Huberman, 1994; Miles et al., 2020).

Pada tahap pengurangan data, peneliti menyeleksi, membuang hal-hal yang tidak perlu, dan memfokuskan data yang ada hanya pada hal-hal yang berhubungan erat dengan tujuan dan masalah penelitian. Data yang sudah dipilih dan disederhanakan kemudian disusun dan disajikan dalam bentuk uraian narasi yang teratur, jelas, serta mudah dipahami, sehingga hubungan antara satu fakta dengan fakta lain dapat terlihat dengan gamblang. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari seluruh fakta yang ada dan melakukan pengecekan ulang kebenaran maknanya dengan cara mencocokkan berbagai sumber dan teori yang ada, agar kesimpulan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah (Miles & Huberman, 1994; Miles et al., 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum, gambaran kehidupan sosial masyarakat di lokasi penelitian menunjukkan adanya ikatan persaudaraan yang cukup kuat serta rasa cinta dan setia kepada negara yang tetap terpelihara dengan baik. Kondisi ini tetap bertahan meskipun di wilayah tersebut terus-menerus terjadi perputaran informasi dan masuknya berita-berita dari luar yang sering kali berisi hal-hal yang meragukan kebenarannya atau bahkan sengaja dibuat untuk memicu pertentangan. Berdasarkan pengamatan dan penelaahan yang dilakukan, hasil penelitian secara rinci dapat dikelompokkan menjadi dua pokok permasalahan utama sesuai dengan fokus penelitian, yaitu:

Efektivitas Kepemimpinan Strategis dalam Menjaga Kestabilan Sosial dan Nasionalisme

Berdasarkan data yang diperoleh, cara kerja dan pola kepemimpinan di daerah terpencil memiliki ciri khas yang sangat istimewa dan berbeda dengan kepemimpinan di kota besar. Pola ini terbentuk dan berakar kuat atas dasar penggabungan antara tugas resmi pemerintah dengan penerapan nilai-nilai adat istiadat setempat, hubungan kekeluargaan yang sangat erat dan mendalam, serta didasari oleh adanya rasa saling percaya yang sangat tinggi antara pemimpin dan rakyatnya.

Langkah-langkah strategis yang biasa dilakukan oleh para pemimpin dalam menjalankan tugasnya antara lain: mengadakan pertemuan atau musyawarah secara berkala dan terus-menerus

untuk mendengar serta menyampaikan pendapat, memfasilitasi dan mendamaikan jika ada perbedaan pendapat atau perselisihan antarwarga, serta menanamkan dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan melalui kegiatan-kegiatan adat maupun kegiatan keagamaan yang sudah menjadi kebiasaan hidup masyarakat.

Ketika menghadapi atau mendapati adanya berita atau provokasi yang datang dari luar yang bertujuan merusak ketenteraman, para pemimpin segera mengambil peran penting sebagai penyaring informasi utama dan menjadi sumber kebenaran yang sangat dipercaya oleh masyarakat. Pemimpinlah yang kemudian menerangkan kembali berita-berita rumit tersebut ke dalam bentuk bahasa dan cara pandang yang sederhana, mudah dimengerti, dan dekat dengan hati masyarakat setempat. Mereka juga menjelaskan bagian mana dari berita itu yang benar dan mana yang bohong atau diputarbalikkan, serta selalu mengaitkan kembali segala persoalan yang ada dengan kepentingan dan persatuan bangsa Indonesia.

Hasil dari cara kerja kepemimpinan seperti ini sangat terasa nyata dampaknya. Segala gesekan atau perselisihan yang sempat muncul akibat pengaruh luar dapat diredam dan diselesaikan dengan cepat, serta rasa setia dan cinta masyarakat terhadap negara tetap terpelihara dengan baik dan aman. Hal ini menunjukkan bahwa cara kepemimpinan yang diterapkan di wilayah-wilayah tersebut memiliki tingkat keberhasilan dan keefektifan yang tinggi dalam menjaga ketenteraman.

Namun di sisi lain, penelitian ini juga menemukan adanya kelemahan besar dalam sistem kepemimpinan tersebut, yaitu ketergantungan yang sangat berlebihan terhadap sosok atau pribadi pemimpin tertentu saja. Artinya, keamanan dan ketenteraman masyarakat sangat bergantung pada apakah orang yang menjabat pemimpin itu memiliki kemampuan dan wibawa yang baik atau tidak. Jika sosok pemimpin tersebut tidak lagi berada dalam struktur kepemimpinan, maka kekuatan pertahanan masyarakat berpotensi menurun dan menjadi lebih lemah. Kendala lain yang juga ditemukan adalah masalah lokasi wilayah yang sulit dijangkau serta kurangnya sarana komunikasi yang memadai. Hal ini membuat proses penyebaran berita benar atau penjelasan dari pemimpin menjadi memerlukan waktu yang lama dan biaya serta tenaga yang jauh lebih besar dibandingkan daerah lain.

Pemetaan Tanggapan Kepemimpinan terhadap Arus Informasi dan Isu Provokatif

Berdasarkan pengamatan mendalam mengenai kapan dan bagaimana cara pemimpin menanggapi berita atau isu yang berkembang, serta seberapa tepat dan cepat langkah yang mereka ambil, maka gaya atau tipe tanggapan kepemimpinan dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu:

1. **Tanggapan Cepat dan Tepat:** Cara ini dilakukan apabila berita atau isu yang berkembang itu dinilai sangat berbahaya, dapat langsung mengancam keselamatan umum, keamanan wilayah, maupun menyangkut kepentingan hidup masyarakat sehari-hari yang paling dasar. Dalam situasi seperti ini, pemimpin bertindak sangat sigap dan cepat, segera mengumpulkan segala keterangan dan fakta yang ada, lalu segera mengeluarkan pernyataan penjelasan kepada masyarakat, serta melakukan tindakan-tindakan pencegahan agar isu tersebut tidak sempat menyebar luas dan menimbulkan kerusakan.
2. **Tanggapan Sedang atau Bertahap:** Cara ini biasa dilakukan jika isu yang muncul itu sebenarnya tidak memberikan dampak buruk secara langsung saat ini juga, namun jika dibiarkan terus berlarut-larut maka bisa menjadi bahaya di masa yang akan datang. Tindakan yang diambil pemimpin dalam hal ini adalah dengan mengawasi dan mengikuti perkembangan berita itu secara terus-menerus, serta mengumpulkan sebanyak mungkin fakta dan data pendukung. Setelah keadaan dianggap cukup jelas, barulah pemimpin

- melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat secara perlahan dan bertahap.
3. Tanggapan Lambat atau Terlambat: Kondisi ini terjadi apabila berita atau isu yang datang itu bersifat sangat luas, menyangkut urusan politik dunia yang jauh dari keseharian masyarakat, atau isu yang sumber asalnya belum diketahui secara jelas dan sah. Di sini, masalah keterbatasan sarana komunikasi dan jarak yang jauh menjadi penghambat utama, sehingga penjelasan dan pendidikan dari pemimpin baru sampai ke telinga masyarakat ketika berita bohong atau provokasi dari luar itu sudah lebih dahulu menyebar luas dan berkembang.

Secara keseluruhan, kemampuan para pemimpin lokal dalam menanggapi masalah yang berhubungan dengan kehidupan adat dan budaya sendiri maupun masalah dalam negeri sudah sangat baik dan tangkas. Namun demikian, masih ditemukan kekurangan dalam hal kemampuan dan pengetahuan untuk memahami serta menanggapi masalah-masalah politik besar dunia atau pengaruh luar yang disampaikan menggunakan cara-cara teknologi canggih dan sistem informasi yang modern.

Pembahasan

Pembahasan ini disusun berdasar pada dua poin hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, agar terdapat kesesuaian dan keterkaitan yang utuh mulai dari permasalahan, hasil temuan, pembahasan, hingga kesimpulan penelitian. Pembahasan dilakukan secara mendalam, luas, dan terperinci dengan mengaitkan fakta lapangan dengan teori-teori yang telah diuraikan sebelumnya, serta membandingkan dengan hasil penelitian para ahli terdahulu.

Efektivitas Kepemimpinan Strategis dalam Menjaga Kestabilan Sosial dan Nasionalisme

Berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan, kepemimpinan yang menggabungkan kekuatan adat, hubungan kekeluargaan, serta kepercayaan bersama merupakan salah satu faktor penting yang membuat para pemimpin lokal berhasil dalam menjaga ketenteraman dan rasa persatuan. Temuan ini sejalan dengan Horlings et al. (2018), yang menunjukkan bahwa kepemimpinan di wilayah pedesaan memiliki kemampuan penting untuk menjembatani berbagai kepentingan, membangun hubungan baru, mendorong pembelajaran bersama, serta mengembangkan kapasitas kolektif sesuai dengan karakteristik wilayah. Dalam konteks Indonesia, Hakim et al. (2025) juga menemukan bahwa resiliensi komunitas sangat terkait dengan nilai, norma, identitas, dan struktur sosial lokal, termasuk praktik *gotong royong*, musyawarah, keterikatan terhadap tempat, dan pola kepemimpinan lokal. Dengan demikian, efektivitas kepemimpinan yang ditemukan dalam penelitian ini tidak berdiri sendiri, tetapi berakar pada kemampuan pemimpin mengaktifkan modal sosial dan budaya yang telah hidup di tengah masyarakat (Horlings et al., 2018; Hakim et al., 2025).

Jika ditinjau dari sudut pandang teori kepemimpinan strategis, maka apa yang dilakukan oleh para pemimpin di wilayah penelitian ini merupakan bentuk penerapan kepemimpinan strategis pada konteks lokal. Kepemimpinan strategis menuntut kemampuan membaca perubahan lingkungan, menentukan arah, mengembangkan sumber daya dan kapabilitas, serta menggerakkan seluruh kekuatan yang tersedia untuk mencapai tujuan bersama dalam lingkungan yang penuh ketidakpastian (Ireland & Hitt, 1999). Di sini, para pemimpin tidak hanya sekadar menjalankan tugas administrasi pemerintahan, melainkan mereka juga berperan aktif mengerahkan nilai budaya dan tradisi sebagai sumber daya sosial dalam menjaga ketahanan masyarakat. Pendekatan berbasis budaya menjadi penting karena nilai dan adat istiadat telah hidup serta membentuk kerangka pemaknaan masyarakat dalam menjalani kehidupan bersama. Ketika pemimpin berkomunikasi

menggunakan bahasa, simbol, dan nilai yang dipahami masyarakat, pesan yang disampaikan menjadi lebih kontekstual dan dekat dengan pengalaman sosial mereka. Hal ini sejalan dengan konsep *place-based leadership*, yang menempatkan pemahaman atas karakter, relasi, dan sumber daya lokal sebagai salah satu dasar penting kepemimpinan di suatu wilayah (Horlings et al., 2018).

Hal ini juga sesuai dengan perspektif ketahanan komunitas. Masyarakat yang memiliki sistem nilai, jejaring sosial, pengetahuan lokal, dan kapasitas kolektif yang kuat mempunyai sumber daya yang dapat digunakan untuk beradaptasi ketika menghadapi tekanan dan perubahan (Magis, 2010; Berkes & Ross, 2013). Pada konteks Indonesia, penelitian Asmal dan Latief (2023) menunjukkan bahwa praktik *gotong royong*, intensitas interaksi, rasa memiliki, dan kebersamaan dapat memperkuat kohesi serta resiliensi komunitas. Temuan yang lebih baru dari Hakim et al. (2025) juga memperlihatkan bahwa *gotong royong*, musyawarah, ritual, keterikatan terhadap tempat, dan bentuk kepemimpinan lokal berperan dalam proses resiliensi masyarakat Indonesia. Dengan demikian, nilai-nilai persaudaraan, musyawarah, dan kepemimpinan adat yang ditemukan dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai sumber daya sosial yang memperkuat kemampuan masyarakat menghadapi tekanan dari luar (Asmal & Latief, 2023; Hakim et al., 2025).

Lebih jauh lagi, keberhasilan ini menegaskan bahwa makna kepemimpinan strategis di daerah terpencil tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengatur urusan pemerintahan, tetapi juga dengan kemampuan mempertemukan tujuan negara dengan realitas sosial masyarakat sehari-hari. Pemimpin lokal menjalankan fungsi penghubung antara kepentingan yang lebih luas dengan kebutuhan, nilai, dan identitas lokal. Fungsi menjembatani tersebut merupakan karakter penting dalam kepemimpinan berbasis tempat karena memungkinkan berbagai aktor dan kepentingan membangun tindakan bersama tanpa menghilangkan kekhasan lokal (Horlings et al., 2018).

Namun di sisi lain, ditemukannya kelemahan berupa ketergantungan berlebihan terhadap satu atau beberapa orang pemimpin tertentu memberikan implikasi teoretis yang penting. Perspektif resiliensi komunitas menempatkan ketahanan sebagai kapasitas yang tumbuh melalui sumber daya komunitas, jejaring sosial, pembelajaran, agensi, kepemimpinan, dan kemampuan mengorganisasikan diri secara kolektif, sehingga ketahanan yang berkelanjutan tidak ideal apabila seluruh kapasitas tersebut hanya terkonsentrasi pada satu aktor (Magis, 2010; Berkes & Ross, 2013). Kondisi yang terjadi di lapangan mengindikasikan bahwa sebagian ketahanan sosial masih terikat pada kewibawaan individu dan belum sepenuhnya menjadi kapasitas yang melembaga dalam struktur masyarakat. Ketergantungan semacam ini menimbulkan persoalan keberlanjutan dan suksesi karena kapasitas komunitas dapat melemah apabila figur yang selama ini menjadi pusat kepercayaan tidak lagi menjalankan perannya. Dalam terminologi Weber, otoritas yang sangat bertumpu pada kualitas personal pemimpin juga menghadapi persoalan kontinuitas sehingga memerlukan proses pelembagaan atau *routinization* agar otoritas dan fungsi sosialnya dapat bertahan melampaui keberadaan satu figur tertentu (Weber, 1978). Karena itu, temuan penelitian ini menunjukkan pentingnya mengembangkan ketahanan dari kepemimpinan yang bersifat personal menuju kapasitas kolektif yang lebih melembaga.

Pemetaan Tanggapan Kepemimpinan terhadap Arus Informasi dan Isu Provokatif

Pengelompokan tiga jenis tanggapan kepemimpinan yang ditemukan dalam penelitian ini merupakan temuan konseptual yang dapat memperluas pembahasan mengenai kepemimpinan lokal. Tipologi tersebut tidak hanya menunjukkan tindakan yang dilakukan pemimpin, tetapi juga memperlihatkan variasi kecepatan respons berdasarkan tingkat ancaman, kedekatan isu dengan kehidupan masyarakat, ketersediaan informasi, dan kapasitas pemimpin untuk memahami masalah. Karena tipologi cepat-tepat, sedang-bertahap, dan lambat-terlambat dihasilkan dari data penelitian

ini, ketiga kategori tersebut lebih tepat diposisikan sebagai temuan empiris penelitian, bukan sebagai kategori yang telah tersedia sebelumnya dalam teori kepemimpinan.

Berdasarkan teori kepemimpinan strategis, kemampuan membaca lingkungan, mengenali ancaman dan peluang, menentukan arah, serta mengambil tindakan yang relevan dalam situasi yang berubah merupakan bagian penting dari kepemimpinan strategis (Ireland & Hitt, 1999). Dari hasil penelitian ini, terlihat bahwa para pemimpin lokal memiliki kemampuan untuk membedakan masalah berdasarkan tingkat kedekatan dan urgensinya. Ketika masalah berkaitan langsung dengan adat dan kehidupan sehari-hari masyarakat, pemimpin bertindak lebih cepat dan tepat. Hal ini menunjukkan kuatnya pengetahuan kontekstual mereka terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat sendiri. Sebaliknya, ketika masalah datang dari luar dan berkaitan dengan politik internasional atau teknologi informasi yang lebih kompleks, tanggapan menjadi lebih lambat. Temuan tersebut menunjukkan adanya hubungan antara kecepatan respons, penguasaan konteks masalah, dan akses terhadap informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan.

Keterbatasan sarana komunikasi dan jarak wilayah memperkuat persoalan tersebut. Penelitian mengenai kesenjangan digital di Indonesia menunjukkan bahwa ketimpangan akses internet tidak hanya berkaitan dengan karakteristik individu, tetapi juga dengan kesenjangan infrastruktur telekomunikasi dan kondisi geografis. Sujarwoto dan Tampubolon (2016) menemukan kesenjangan akses internet antara wilayah perkotaan dan pedesaan, kota dan pedalaman, serta pulau terpencil dan pulau utama. Kartiasih et al. (2023) juga menunjukkan bahwa tingkat perkembangan digital cenderung lebih rendah pada wilayah perdesaan, pegunungan, terpencil, dan kepulauan dibandingkan pusat-pusat metropolitan. Temuan penelitian ini dengan demikian memperlihatkan konsekuensi sosial dari kesenjangan tersebut pada tingkat kepemimpinan lokal: pemimpin tidak hanya menghadapi keterbatasan teknologi, tetapi juga keterlambatan memperoleh bahan yang diperlukan untuk menilai dan menjelaskan suatu isu kepada masyarakat.

Masalah ini menjadi semakin penting karena informasi yang salah dapat menyebar dengan sangat cepat. Studi Vosoughi et al. (2018) terhadap penyebaran berita di media sosial menemukan bahwa informasi palsu menyebar secara lebih jauh, lebih cepat, lebih dalam, dan lebih luas dibandingkan informasi yang benar, terutama pada berita politik. Oleh karena itu, pernyataan bahwa “kebenaran akan selalu kalah cepat dibandingkan kebohongan” sebaiknya dipahami bukan sebagai hukum universal, tetapi sebagai gambaran mengenai risiko asimetri penyebaran informasi. Dalam wilayah yang kapasitas komunikasinya terbatas, keterlambatan klarifikasi dapat memperbesar ruang bagi informasi keliru untuk terlebih dahulu membentuk persepsi masyarakat (Vosoughi et al., 2018).

Dalam kondisi seperti itu, pemimpin lokal memiliki posisi penting sebagai perantara informasi. Studi mengenai arus informasi di komunitas rural menunjukkan bahwa kredibilitas informasi sangat berkaitan dengan kepercayaan terhadap sumber, kedekatan relasional, dan kemampuan penyampai informasi memahami konteks lokal; keterbatasan infrastruktur pada saat yang sama dapat memperbesar kesulitan pengelolaan informasi (Enyinnaya et al., 2026). Penelitian Cuadra dan Cotoron (2025) juga menunjukkan bahwa penguatan kapasitas lokal, jaringan komunikasi, literasi informasi, serta keterlibatan pemimpin lokal yang dipercaya dapat membantu masyarakat menghadapi informasi yang salah. Temuan tersebut mendukung hasil penelitian ini mengenai pentingnya fungsi pemimpin sebagai penyaring dan penerjemah informasi bagi masyarakat, namun sekaligus menunjukkan bahwa fungsi tersebut perlu ditopang oleh kemampuan verifikasi dan jaringan informasi yang memadai.

Penemuan bahwa pemimpin masih kurang mampu menghadapi isu politik luar negeri yang

rumit memberikan petunjuk penting bagi pengembangan kapasitas kepemimpinan. Persoalannya tidak semata-mata terletak pada kemauan pemimpin untuk merespons, tetapi juga pada adanya kesenjangan antara kuatnya pengetahuan lokal dan terbatasnya akses terhadap pengetahuan serta teknologi informasi yang lebih luas. Penelitian tentang kesenjangan digital di Indonesia memperlihatkan bahwa wilayah rural dan periferal masih menghadapi disparitas dalam infrastruktur dan perkembangan digital (Sujarwoto & Tampubolon, 2016; Kartiasih et al., 2023). Sementara itu, kajian mengenai penanganan informasi salah menekankan pentingnya literasi digital, kemampuan verifikasi informasi, jaringan komunikasi lokal yang dapat dipercaya, serta peningkatan kapasitas aktor komunitas (Cuadra & Cotoron, 2025). Oleh karena itu, peningkatan kemampuan memahami isu eksternal, literasi informasi, verifikasi sumber, dan penggunaan teknologi komunikasi menjadi kebutuhan penting bagi pemimpin daerah.

Secara keseluruhan, pembahasan atas kedua poin hasil penelitian ini mempertegas bahwa menjaga persatuan bangsa di daerah-daerah pinggiran tidak hanya berkaitan dengan kehadiran perangkat keamanan atau keberadaan aturan formal. Temuan penelitian menunjukkan pentingnya hubungan saling percaya antara pemimpin dan masyarakat, kemampuan mengaktifkan nilai dan sumber daya budaya lokal, serta kapasitas pemimpin dalam mengelola dan menjelaskan informasi. Dalam perspektif yang lebih luas, kepemimpinan lokal yang efektif bekerja melalui kombinasi antara kapasitas strategis, keterlekatan sosial-budaya, kemampuan membangun tindakan kolektif, dan kecakapan menghadapi lingkungan informasi yang terus berubah (Ireland & Hitt, 1999; Horlins et al., 2018; Hakim et al., 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta di lapangan dan pembahasan teoretis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan strategis di wilayah terpencil berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial, memperkuat persatuan masyarakat, dan mempertahankan loyalitas terhadap negara. Efektivitas kepemimpinan tersebut terutama ditopang oleh pemanfaatan nilai-nilai budaya lokal, kuatnya hubungan kekeluargaan, serta pendekatan musyawarah dan persuasif dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat. Posisi pemimpin sebagai figur yang dipercaya sekaligus sumber informasi bagi masyarakat juga menjadi unsur penting dalam meredam provokasi dan pengaruh eksternal yang berpotensi mengganggu stabilitas. Meskipun demikian, pola kepemimpinan ini masih menghadapi kelemahan berupa tingginya ketergantungan pada kapasitas personal pemimpin dan terbatasnya dukungan kelembagaan serta infrastruktur. Oleh karena itu, ketahanan sosial perlu diperkuat melalui pelebagaan mekanisme kepemimpinan agar keberlanjutan stabilitas dan persatuan tidak bergantung pada figur tertentu. Dalam menghadapi informasi dan narasi yang berpotensi memecah belah, respons pemimpin dapat dikategorikan ke dalam tiga pola, yaitu respons cepat, moderat, dan lambat, yang dipengaruhi oleh karakter persoalan, tingkat ancaman, ketersediaan informasi, dan akses terhadap sarana komunikasi. Para pemimpin lokal menunjukkan kemampuan yang kuat dalam menangani persoalan adat dan sosial yang dekat dengan kehidupan masyarakat, tetapi masih menghadapi keterbatasan dalam memahami isu geopolitik dan pengaruh eksternal yang semakin kompleks. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan ketahanan nasional di wilayah terpencil dan perbatasan memerlukan peningkatan literasi politik, kemampuan mengelola dan memverifikasi informasi, penguatan kapasitas kelembagaan, serta pemerataan infrastruktur komunikasi agar kepemimpinan lokal mampu merespons berbagai bentuk ancaman secara lebih adaptif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arcos, R., Gertrudix, M., Arribas, C., & Cardarilli, M. (2022). Responses to digital disinformation as part of hybrid threats: A systematic review on the effects of disinformation and the effectiveness of fact-checking/debunking. *Open Research Europe*, 2, 8. doi: 10.12688/openreseurope.14088.1.
- Arcos, R., Gertrudix, M., Arribas, C., & Cardarilli, M. (2022). Responses to digital disinformation as part of hybrid threats: A systematic review on the effects of disinformation and the effectiveness of fact-checking/debunking. *Open Research Europe*, 2, 8. <https://doi.org/10.12688/openreseurope.14088.1>
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Asmal, I., & Latief, R. (2023). The presence of a family communal space as a form of local wisdom towards community cohesion and resilience in coastal settlements. *Sustainability*, 15(10), 8167. <https://doi.org/10.3390/su15108167>
- Bennett, W. L., & Livingston, S. (2018). The disinformation order: Disruptive communication and the decline of democratic institutions. *European Journal of Communication*, 33(2), 122–139. doi: 10.1177/0267323118760317.
- Berkes, F., & Ross, H. (2013). Community resilience: Toward an integrated approach. *Society & Natural Resources*, 26(1), 5–20. <https://doi.org/10.1080/08941920.2012.736605>
- Berkes, F., & Ross, H. (2013). Community resilience: Toward an integrated approach. *Society & Natural Resources*, 26(1), 5–20. <https://doi.org/10.1080/08941920.2012.736605>
- Boal, K. B., & Hooijberg, R. (2000). Strategic leadership research: Moving on. *The Leadership Quarterly*, 11(4), 515–549. [https://doi.org/10.1016/S1048-9843\(00\)00057-6](https://doi.org/10.1016/S1048-9843(00)00057-6)
- Chan, J., To, H.-P., & Chan, E. (2006). Reconsidering social cohesion: Developing a definition and analytical framework for empirical research. *Social Indicators Research*, 75(2), 273–302. <https://doi.org/10.1007/s11205-005-2118-1>
- Cuadra, J. M., & Cotoron, V. N. (2025). Addressing false information through local capacity building in community-based disaster risk management. *Jàmbá: Journal of Disaster Risk Studies*, 17(1), a1836. <https://doi.org/10.4102/jamba.v17i1.1836>
- Enyinnaya, J., Kelp, N., Anderson, A. A., Ferrell, T., & Cagle, S. (2026). Examining quality information flow in rural communities during disasters: Findings from community leaders in emergency response. *Journal of Risk Research*, 29(3), 376–390. <https://doi.org/10.1080/13669877.2026.2636965>
- Freedman, J., Hoogensen Gjørsv, G., & Razakamaharavo, V. (2021). Identity, stability, hybrid threats and disinformation. *ICONO 14*, 19(1), 38–69. doi: 10.7195/ri14.v19i1.1618.
- Freedman, J., Hoogensen Gjørsv, G., & Razakamaharavo, V. (2021). Identity, stability, hybrid threats and disinformation. *ICONO 14*, 19(1), 38–69. <https://doi.org/10.7195/ri14.v19i1.1618>
- Hakim, M. A., Kirana Anggarani, F., Okvitawanli, A., & Hamamura, T. (2025). How culture shapes community resilience: A cultural-psychological case study of coastal communities' responses to climate disaster in Indonesia. *Asian Journal of Social Psychology*, 28(3), e70039. <https://doi.org/10.1111/ajsp.70039>
- Hitt, M. A., Haynes, K. T., & Serpa, R. (2010). Strategic leadership for the 21st century. *Business Horizons*, 53(5), 437–444. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2010.05.004>
- Horlings, L. G., Roep, D., & Wellbrock, W. (2018). The role of leadership in place-based development and building institutional arrangements. *Local Economy*, 33(3), 245–268. doi: 10.1177/0269094218763050.

-
- Horlings, L. G., Roep, D., & Wellbrock, W. (2018). The role of leadership in place-based development and building institutional arrangements. *Local Economy*, 33(3), 245–268. <https://doi.org/10.1177/0269094218763050>
- Horlings, L. G., Roep, D., & Wellbrock, W. (2018). The role of leadership in place-based development and building institutional arrangements. *Local Economy*, 33(3), 245–268. <https://doi.org/10.1177/0269094218763050>
- Ireland, R. D., & Hitt, M. A. (1999). Achieving and maintaining strategic competitiveness in the 21st century: The role of strategic leadership. *Academy of Management Executive*, 13(1), 43–57. <https://doi.org/10.5465/ame.1999.1567311>
- Ireland, R. D., & Hitt, M. A. (1999). Achieving and maintaining strategic competitiveness in the 21st century: The role of strategic leadership. *Academy of Management Executive*, 13(1), 43–57. <https://doi.org/10.5465/ame.1999.1567311>
- Jayadi, S. (2022). Local wisdom as social cohesion of “Kebhinekaan”: The study of Hindu-Islamic relations in Eastern Indonesia. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 6(2), 129–143.
- Kalniete, S., & Pildegovičs, T. (2021). Strengthening the EU’s resilience to hybrid threats. *European View*, 20(1), 23–33. doi: 10.1177/17816858211004648.
- Kartiasih, F., Djalal Nachrowi, N., Wisana, I. D. G. K., & Handayani, D. (2023). Inequalities of Indonesia’s regional digital development and its association with socioeconomic characteristics: A spatial and multivariate analysis. *Information Technology for Development*, 29(2–3), 299–328. doi: 10.1080/02681102.2022.2110556.
- Kartiasih, F., Djalal Nachrowi, N., Wisana, I. D. G. K., & Handayani, D. (2023). Inequalities of Indonesia’s regional digital development and its association with socioeconomic characteristics: A spatial and multivariate analysis. *Information Technology for Development*, 29(2–3), 299–328. <https://doi.org/10.1080/02681102.2022.2110556>
- Kartiasih, F., Djalal Nachrowi, N., Wisana, I. D. G. K., & Handayani, D. (2023). Inequalities of Indonesia’s regional digital development and its association with socioeconomic characteristics: A spatial and multivariate analysis. *Information Technology for Development*, 29(2–3), 299–328. <https://doi.org/10.1080/02681102.2022.2110556>
- Korstjens, I., & Moser, A. (2018). Series: Practical guidance to qualitative research. Part 4: Trustworthiness and publishing. *European Journal of General Practice*, 24(1), 120–124. <https://doi.org/10.1080/13814788.2017.1375092>
- Magis, K. (2010). Community resilience: An indicator of social sustainability. *Society & Natural Resources*, 23(5), 401–416. <https://doi.org/10.1080/08941920903305674>
- Magis, K. (2010). Community resilience: An indicator of social sustainability. *Society & Natural Resources*, 23(5), 401–416. <https://doi.org/10.1080/08941920903305674>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi, Cet. 41). PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyoto. (2011). National integration and its process in Indonesia. *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 12(1).
- Myrdal, G. (1957). *Economic theory and under-developed regions*. G. Duckworth.
- Naldi, H., Muchtar, H., & Luthfi, Z. F. (2020). National integration models among ethnics groups: A study among various ethnics in Indonesia. In *Proceedings of the International*
-

-
- Conference on Public Administration, Policy and Governance*. Atlantis Press.
<https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200305.217>
- Nye, J. S. (2023). *Soft power and great-power competition: Shifting sands in the balance of power between the United States and China*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-981-99-0714-4>
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42, 533–544. <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice* (4th ed.). Sage Publications.
- Pawito. (2007). *Penelitian komunikasi kualitatif*. LKiS Pelangi Aksara.
- Ricketts, K. G., & Ladewig, H. (2008). A path analysis of community leadership within viable rural communities in Florida. *Leadership*, 4(2). doi: 10.1177/1742715008089635.
- Ruiz-Mallén, I., & Corbera, E. (2013). Community-based conservation and traditional ecological knowledge: Implications for social-ecological resilience. *Ecology and Society*, 18(4), Article 12. <https://doi.org/10.5751/ES-05867-180412>
- Ruslanjari, D., Putri, R. A. P., Puspitasari, D., & Sulistiyo, S. (2024). Embracing leadership of local actors and community in disaster risk reduction of Yogyakarta. *Jàmbá: Journal of Disaster Risk Studies*, 16(1), 1679. doi: 10.4102/jamba.v16i1.1679.
- Saad, S., & Sulehan, J. (2014). Local leadership and social cohesion at Malaysia-Indonesia border. *Global Journal of Human-Social Science*, 14(H3), 17–22.
- Satori, D., & Komariah, A. (2020). *Metodologi penelitian kualitatif* (Cet. 8). Alfabeta.
- Skerratt, S. (2011). A critical analysis of rural community leadership: Towards systematised understanding and dialogue across leadership domains. *The Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 17(1), 63–82.
- Sugiyono. (2024). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Ed. 2, Cet. 30). Alfabeta.
- Sujarwoto, S., & Tampubolon, G. (2016). Spatial inequality and the Internet divide in Indonesia 2010–2012. *Telecommunications Policy*, 40(7), 602–616. doi: 10.1016/j.telpol.2015.08.008.
- Sujarwoto, S., & Tampubolon, G. (2016). Spatial inequality and the Internet divide in Indonesia 2010–2012. *Telecommunications Policy*, 40(7), 602–616. <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2015.08.008>
- Sujarwoto, S., & Tampubolon, G. (2016). Spatial inequality and the Internet divide in Indonesia 2010–2012. *Telecommunications Policy*, 40(7), 602–616. <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2015.08.008>
- Suwarningsih, S., Samiyono, D., & Purnomo, D. (2018). Harmonisasi sosial masyarakat perbatasan Indonesia-Malaysia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(1). doi: 10.18196/hi.71120.
- Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. *Science*, 359(6380), 1146–1151. <https://doi.org/10.1126/science.aap9559>
- Weber, M. (1978). *Economy and society: An outline of interpretive sociology*. University of California Press.
-